



Memberikan Pendidikan Politik Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Bengkulu

Anita Marianata

Administrasi Publik FISIP Universitas Bengkulu

anitamarianata@gmail.com

Iis Sujarwati

Universitas Bengkulu

iissujarwati@unib.ac.id

Syafryadin

Universitas Bengkulu

syafryadin@unib.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah kegiatan penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa sekolah (pemilih pemula), dalam hal ini diwakili oleh Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat adalah (1) dialog antara Tim Pengabdian Dosen dengan siswa sekolah, (2) pemberian pengarahan dalam menyusun strategi untuk menghadapi *black campaign*, (3) lomba desain stiker anti *black campaign* pada pemilih pemula, (4) pembagian stiker anti *black campaign* pada pemilih pemula. Pendidikan politik terhadap siswa sekolah sebagai pemilih pemula menimbulkan dampak positif, antara lain: mengurangi jumlah penyimpangan dalam proses pemilihan umum yang akan datang; sebagai penambah wawasan bagi siswa sekolah atau pemilih pemula mengenai pentingnya pemilihan umum tanpa ada *black campaign*; sebagai motivasi siswa sekolah atau pemilih pemula untuk menyampaikan aspirasi berdasar hati nurani.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Pemilih Pemula, Pendidikan Politik

PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan sebagai bagian tak terpisahkan dari kegiatan PPM sebagai bentuk kepedulian terhadap buruknya situasi dan kondisi politik di

Indonesia, khususnya di Kota Bengkulu. Program pemberian pendidikan politik dimaksudkan untuk menambah wawasan masyarakat mengenai politik, khususnya pemilih pemula yaitu siswa sekolah.

Perwujudan bukti sebuah negara menerapkan sistem demokrasi ialah dengan menggelar perhelatan pemilihan umum. Pemilihan umum diharapkan mampu merefleksikan kedaulatan rakyat sepenuhnya, khususnya dalam penyaluran aspirasi dan pemenuhan hak politik bagi rakyat. Selanjutnya pemilihan umum dapat pula berfungsi sebagai sarana legitimasi politik, perwakilan atau representasi politik, mekanisme pergantian kekuasaan atau sirkulasi elit dan sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi politik yang bersifat massal dan *periodic*. Disisi lain adanya kejelasan sistem pemilu sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional karena dapat mempengaruhi sistem partai, sistem kabinet pemerintahan, mekanisme hubungan kerja antar lembaga negara dan tertinggi negara, alat proses budaya politik yang berkembang di masyarakat.

Sistem pemilihan umum merupakan salah satu sistem atau kelembagaan penting di dalam sistem demokrasi. Pemilu merupakan sarana langsung bagi masyarakat yang cukup usia untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Tahapan proses pemilu antara lain: penetapan daftar pemilih, tahap pencalonan kandidat, tahap kampanye, tahap pemungutan serta penghitungan suara, dan hasil perolehan suara sehingga kita dapat menentukan kandidat yang terpilih (Cholisin, 2000: 47).

Penerapan sistem pemilihan umum di Indonesia masih terbelang belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kehendak rakyat Indonesia. Pasca reformasi perubahan sistem pemilu yang sebelumnya menggunakan sistem pemilihan proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka memang relevan bagi sosio-kondisi Indonesia sendiri dan tuntutan rakyat untuk menyelenggarakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan kata lain sangat diharapkan adanya transparansi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (Polidano, 1998; 110).

Penilaian sistem pemilu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu kondisi sistem ekonomi, kondisi lembaga-lembaga politik, proses pemungutan suara, proses pemilihan kepala

daerah, tatacar pemilihan, tingkah laku masyarakat dalam memilih, partisipasi perempuan dalam partai politik, pendapat masyarakat mengenai demokrasi, dan munculnya masalah-masalah baru dalam pemilu. Kandidat yang maju telah diseleksi sebelumnya karena harus memenuhi persyaratan dan sistem sesuai peraturan yang berlaku. Sistem pemilu saat ini merencanakan bayak pemilu kepala daerah sehingga dalam melakukan proses pemungutan suara diperlukan informasi dan tatacara pemilu yang efektif kepada masyarakat luas.

Masyarakat Indonesia pada umumnya telah mampu mengikuti proses pemilu dan menghormati hasil pemilu, namun pemilu di Indonesia masih banyak menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendala utama dalam pemilu yaitu pemberian informasi kepada masyarakat mengenai proses-proses utama dalam pemilihan kepala daerah. Program pengabdian pada masyarakat dalam pemberian pendidikan politik perlu dilakukan mengingat perlunya peningkatan informasi kepada masyarakat mengenai proses pemilu yang penting seperti informasi kepada masyarakat mengenai proses pemilu yang penting seperti informasi pra kandidat, proses pencalonan kandidat, proses penghitungan suara sampai calon terpilih, kampanye pemilu yang dilakukan, cara masyarakat mendaftari diri sebagai pemilih, tata cara yang tepat memadai surat suara, dan dimana serta kapan harus memilih.

Kurangnya informasi penting mengenai proses pemilihan merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena hal ini harus dimengerti oleh masyarakat yang memilih dalam pemilu. Maka yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan pendidikan dan pemberian informasi yang lengkap terhadap masyarakat sebagai pemilih. Pemberian pendidikan proses pemilu harus memperhatikan latar belakang masyarakat yang bervariasi agar informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh semua lapisan masyarakat Indonesia, termasuk siswa usia sekolah yang notabennya merupakan pemilih pemula.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu diperlukan sumber informasi seperti brosur, iklan di media cetak/internet, surat-surat melalui pos, kampanye iklan di radio, poster, debat/dialog kandidat pemilu dan lain-lain. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang berwenang dalam proses pemilu merupakan sistem penting dalam pelaksanaan pemilu, sehingga diperlukan peran lembaga-lembaga pemilu yang efektif dan mampu menjaga nama

baiknya. Tingkat kepercayaan masyarakat pula harus di dukung oleh anggota lembaga-lembaga pemilu yang memiliki keahlian mengatasi masalah-masalah pemilu dan mampu bersikap adil dengan tidak memihak salah satu partai politik.

Hal utama yang harus dilakukan pemilih yaitu memastikan namanya ada dalam daftar pemilih, namun pada umumnya telah ada petugas pemilu yang mendatangi tiap rumah untuk mendata. Daftar pemilih harus akurat sehingga masyarakat harus menunjukkan dokumen sah yaitu kartu pemilih dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar proses pemilu berjalan dengan efektif. Pada praktek pemilihan, pemilih pemula akan dihadapkan pada prosedur pemilihan yaitu cara melakukan pengecekan daftar pemilih, dan cara menandai kartu suara secara benar. Hal tersebut harus dimengerti oleh masyarakat, namun kenyataannya masih banyak siswa sekolah yang belum paham dalam melakukan prosedur pemilihan.

Pemilih pemula juga mengalami kendala karena cara menandai surat suara selalu berubah dari satu pemilu ke pemilu yang lain dan kurangnya informasi mengenai perubahan tersebut. Maka lembaga-lembaga pemilu harus mulai memusatkan perhatian dalam pemberian informasi yang tepat terhadap masyarakat untuk menyelesaikan masalah prosedur pemilihan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini membahas mengenai bagaimana pendidikan politik terpadu bagi siswa sekolah menengah atas negeri 1 Kota Bengkulu?

METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Observasi.** Observasi adalah metode dipergunakan sebagai salah satu piranti dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung ke sekolah dan mengamati

situasi siswa, dan pemberian pengarahan dalam menyusun strategi untuk menghadapi *black campaign*.

2. **Wawancara.** Wawancara yaitu dialog secara langsung untuk memperoleh informasi dari informan terpilih dalam menghimpun informasi yang relevan dengan pengabdian yang akan diadakan di SMAN 1 Kota Bengkulu.
3. ***Focused Group Discussion (FGD)* atau Rembuk Masyarakat.** Dialog antara Tim Pengabdian Dosen dengan siswa sekolah.

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dalam memakai data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang didapatkan untuk kemudian disusun secara sistematis serta ditentukan mana yang terlebih dahulu akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh semua pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatkan kesadaran politik dan meningkatkan kualitas demokrasi, maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan. Oleh karena itu, yang menjadi khalayak sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini terutama adalah pemilih pemula (siswa sekolah yang sudah memiliki KTP) yang usianya sudah masuk sebagai daftar pemilih. Dimana kegiatan ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Bengkulu. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan diketahui bahwa masih banyak siswa sekolah yang belum memahami mengenai pentingnya partisipasi politik terutama bagi kaum muda. Dari 712 siswa SMAN 1 Kota Bengkulu yang sudah memnuhi kriteria untuk menjadi pemilih pemula sebanyak 489 siswa.

Gambar 1

Kegiatan Dialog dan Pengarahan Mengenai Pendidikan Politik di SMAN 1 Kota Bengkulu



Berdasarkan hasil diskusi bersama siswa pemilih pemula, diketahui bahwa sebagian besar siswa belum memahami proses pemilihan umum yang sesuai dengan prosedur dan juga para siswa belum memahami mengenai politik hitam (*black campaign*) dan juga berbahaya *money politik* bagi keberlangsungan demokrasi. Terdapat beberapa siswa pemilih pemula yang belum memiliki pilihan maupun sikap politik, hal tersebut di satu sisi merugikan tapi di satu sisi juga sangat menguntungkan. Dalam hal ini, kelompok kepentingan yang mampu melakukan pendidikan politik yang baik akan mampu membawa para pemilih pemula untuk menjadi simpatik pada kelompok kepentingan tersebut. Tetapi yang tidak melakukan pendidikan politik yang baik dengan sendirinya akan dijauhi para pemilih pemula dan bahkan para pemilih pemula akan semakin apatis terhadap kegiatan politik.

Pendidikan politik (*political education*) adalah pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara atau lebih tepat lagi disebut pendidikan politik adalah pendidikan demokrasi (*democracy education*), pendidikan yang mewujudkan masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang bebas (*free society*) yang hanya dibatasi oleh kebebasan itu sendiri, bukan masyarakat kolektivisme yang “terpasung” oleh atribut-atribut agama atau norma-norma budaya (UNDP, 2001).

Pendidikan politik mampu melahirkan budaya politik yang sehat, yang hingga pada akhirnya berhasil mewujudkan masyarakat demokratis yang bebas dari bias apapun. *In the community planning process there is widespread (participatory) community involvement* (Marianata, 2019). Politik yang sehat tentu menjadi syarat utama dalam menghasilkan masyarakat demokratis tersebut. Sebab, tanpa berjalannya politik yang sehat maka tentu

masyarakat demokratis atau demokrasi itu sendiri kehilangan arahnya sehingga muncullah kebebasan yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya mencederai demokrasi itu sendiri (Cholisin, 2000; 85). Disini lah sebenarnya relevansinya pendidikan politik sebagai upaya penguatan terwujudnya masyarakat demokratis, tentu melihat ini dalam konteks demokrasi kita yang berjalan merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya mereorientasi pendidikan politik yang telah atau sedang berlangsung. Program pengabdian pada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan mengenai politik (siswa sebagai pemilih pemula).

Pendidikan politik adalah segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara) guna mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar dia mendapatkan Mendapatkan informasi, wawasan dan ketrampilan politik sehingga sanggup berikap kritis dan lebih intesional terarah hidupnya. Selain itu bisa menjadi warga Negara yang lebih mantap, tidak terapung tanpa bobot dan tanpa pengaruh orientasi terhadap keadaan sendiri dan kondisi lingkungannya.

Pendidikan politik menjadi penting bagi siswa sebagai upaya penyampaian (penanaman) nilai-nilai pengetahuan dan ideologi warganegara mengenai bagaimana diberlakukannya sistem, regulasi dan kebijakan negara termasuk hal yang dirumuskan oleh kebijakan dan demokrasi politik. Pengetahuan ini penting untuk dimiliki siswa guna untuk mengenali hak-haknya dalam upaya berpartisipasi menegakkan keadilan dan demokrasi. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi tanggung jawab bagi perguruan tinggi selain itu juga penting untuk semua pihak, seperti pemerintah, lembaga politik, LSM, media massa serta komponen-komponen masyarakat lainnya. Pendidikan politik berperan penting sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat pemilih pemula menjadi lebih melek politik. Pemilih pemula yang melek politik adalah pemilih pemula yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan hernegara dalam setiap proses pembangunan. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa.

Pendidikan politik ini dapat memperbaiki pemahaman mengenai politik hitam (*black campaign*), *money politik*, dan mengetuk hati nurani pemilih pemula untuk mau berpartisipasi dalam setiap proses politik yang ada. Menumbuhkan rasa cinta tanah air sedari dini juga sangat diperlukan, agar tidak ada lagi rasa ketidakpedulian terhadap semua proses politik dan demokrasi. Pemilih pemula merupakan ujung tombak untuk memperbaiki dan merubah budaya politik hitam, *money politik*, dan semua unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Siswa sebagai pemilih pemula harus mau menggunakan hak suara, karena hak suara dari pemilih pemula juga akan sangat menentukan keberlangsungan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

SIMPULAN

Pendidikan politik terhadap siswa sekolah sebagai pemilih pemula menimbulkan dampak positif, antara lain:

1. Mengurangi jumlah penyimpangan dalam proses pemilihan umum yang akan datang.
2. Sebagai penambah wawasan bagi siswa sekolah atau pemilih pemula mengenai pentingnya pemilihan umum tanpa ada *black campaign*.
3. Sebagai motivasi siswa sekolah atau pemilih pemula untuk menyampaikan aspirasi berdasar hati nurani.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat mengenai pendidikan politik merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesadaran politik dan meningkatkan kualitas demokratisasi. Dalam hal ini juga perlunya pemerintah dan *stake holder* mengoptimalkan peran agen pendidikan sebagai mitra bagi pelaksanaan pendidikan politik. Dan juga perlunya generasi muda diberi kesempatan serta tanggung jawab yang lebih luas dalam ruang publik seperti halnya dilibatkan sebagai anggota partai politik, ataupun organisasi sosial politik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA



- Bappenas dan Depdagri. (2002). *Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*. Hal 18
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif Edisi kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cholisin. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
- Gormley, T. William Jr, and J. Balla, Steven. (2004). *Bureaucracy and Democracy, Accountability and Performance*. Washington D.C.: CQ Press.
- Harian Seputar Indonesia. (2011). *Konsolidasi Sistem Pemilu*. Jakarta.
- Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Marianata, A. (2019). Inclusive, Responsive, Democratic Local Government Institution and Active Citizens. *Jurnal Policy & Governance Review*, 3 (1), 1-11. <https://doi.org/10.30589/pgr.v3i1.102>
- Polidano, C. (1998). "Why Bureaucrats Can't Always Do What Ministers Want: Multiple Accountabilities in Westminster Democracies." *Public Policy and Administration* 13 (1).
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung; Alfabeta.
- UNDP. (2001). *Transparency and Accountability*. <http://www.pogar.org/themes/transparency.html>.